



Pergeseran Peran Tuan Guru sebagai Pendidik di Lombok Barat (Studi di Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri)

Saepullah^{1*}, Muhammad Habiburrahman²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Qamarul Huda, Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.59702/el-huda.v16i01.300>

Jurnal Info

Dikirim: 07/09/2025

Revisi: 09/09/2025

Diterima: 09/09/2025

Korespondensi:

Phone: +6281917100512

Abstract: The Nurul Hakim Educational Foundation in Lombok Kediri is an Islamic institution that prioritizes da'wah as its primary mission since its establishment. Over time, some of its leaders have taken on dual roles as both educators and political actors. This study aims to describe the shifting roles of Tuan Guru as educators and to analyze the impacts of these shifts on the management of the Nurul Hakim Educational Foundation. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Thematic analysis was conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate a role shift of Tuan Guru from purely educational figures to dual roles as educators and politicians. This shift has influenced the organizational structure, strengthened institutional governance, and encouraged a more equitable distribution of authority. Positive impacts were also observed in the improvement of educational services, development of facilities and infrastructure, and enhancement of teacher professionalism within the foundation. These results suggest that despite the role transformation, Tuan Guru remain central figures in maintaining the consistency of the foundation's da'wah and educational vision.

Keywords: *Tuan Guru, role shift, Islamic education, Nurul Hakim Foundation, politics.*

Abstrak: Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis dakwah yang sejak awal berdiri menempatkan misi dakwah sebagai prioritas utama. Seiring perkembangan, sebagian tokoh yayasan tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga aktif dalam dunia politik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pergeseran peran Tuan Guru sebagai pendidik serta menganalisis dampaknya terhadap pengelolaan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik dengan langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran peran Tuan Guru dari pendidik murni menuju peran ganda sebagai tokoh pendidikan sekaligus aktor politik. Pergeseran tersebut memengaruhi struktur kepengurusan yayasan, memperkuat sistem kelembagaan, serta mendorong distribusi kewenangan yang lebih merata. Dampak positif juga terlihat pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, serta profesionalitas guru yang mengabdikan diri di yayasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat pergeseran peran, Tuan Guru tetap menjadi figur sentral dalam menjaga konsistensi visi dakwah dan pendidikan yayasan.

Kata Kunci: Tuan Guru, pergeseran peran, pendidikan Islam, Yayasan Nurul Hakim, Politik.

Pendahuluan

Tuan Guru merupakan gelar kehormatan yang disematkan pada ulama-ulama di Nusa Tenggara Barat yang memiliki pengaruh terutama atas pengetahuan agama yang mereka miliki (Oktara, 2015).

Tuan Guru (*Ulama*) bagi masyarakat Lombok pada umumnya adalah sebagai seorang pemimpin sosial-spiritual yang tidak hanya berperan memberikan pendidikan dan bimbingan dalam hal keagamaan, sosial, ekonomi saja akan tetapi dalam kehidupan dunia politik tidak sedikit juga yang memberikan arahan dan ajakan untuk memilih calon pemimpin tertentu dengan memberikan penilaian tersendiri terhadap para calon yang dimaksud, sehingga secara otomatis di ikuti (*diamini*) oleh para pengikutnya (*santri dan jamaah*) sang Tuan Guru. Sehingga tidak jauh berbeda dengan tulisan yang di kemukakan oleh Fawaizul Umam bahwa:

“ULAMA, sebagai sebuah institusi sosial-keagamaan, memainkan peran penting terutama dalam masyarakat Muslim yang masih mendepak budaya paternalistik dan memelihara pola kepemimpinan tradisional patron-client. Di berbagai daerah

di tanah air, mereka yang tampil sebagai ulama secara sosialkultural disapa akrab dengan aneka sebutan. Di Jawa, misalnya, mereka lazim dipanggil kiai, di Madura galib disebut kiah, di masyarakat Sunda dihormati dengan sebutan ajengan, di Sumatera biasa dipanggil buya, dan di Lombok disapa takzim dengan sebutan tuan guru (Umam, 2018).”

Akan tetapi seiring dengan laju perubahan dan perkembangan zaman, gelar Tuan Guru banyak berevolusi menjadi simpul kekuatan politik dan politik identitas tertentu, atau juga kerap kali dimanfaatkan oleh para politisi dan partai politik tertentu untuk tujuan-tujuan politiknya, Tuan Guru seakan menjelma menjadi idola baru dalam dunia politik, bahkan Tuan Guru tidak sedikit yang terlibat langsung menjadi aktor politik dengan masuk menjadi anggota partai politik, pengurus dan bahkan ketua (*pimpinan*) partai politik tertentu, sehingga tidak sedikit para Tuan Guru yang terjun langsung menjadi calon yang diusung partai politik, baik dalam kontestasi pilkada bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, gubernur/wakil gubernur, atau menjadi calon legislatif (DPR, DPD dan DPRD) atau terlibat menjadi tim kampanye pendukung calon tertentu.

Dalam pesantren, kiai merupakan tokoh sentral yang mempunyai peranan sebagai *decision maker* (pembuat keputusan) dalam segala hal. Kiai diyakini mempunyai eksistensi karismatik yang merupakan perwujudan dari doktrin *al-„ulamâ“ waratsah al-anbiyâ“* (ulama adalah pewaris para nabi). Pengakuan masyarakat bahwa kiai pewaris para nabi memberikan legitimasi bahwa kiai adalah sosok yang paling menentukan dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi umat, baik berupa masalah pribadi, sosial ekonomi, maupun persoalan yang berkaitan dengan politik. Dengan demikian, keanekaragaman persoalan yang selalu memerlukan solusi dari kiai, khususnya masalah-masalah politik, kekuasaan dan kenegaraan menjadikan kiai dan pesantren tidak hanya berperan dalam memberikan wejangan keagamaan, tapi juga terlibat dalam persoalan politik (Kurniawan, 2013).

Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri merupakan Yayasan Pendidikan yang terbuka (*eksklusif*) dalam bermazhab, dimana hampir semua mazhab yang empat (Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali) diterima dan terpakai disana, kemudian dalam praktik-praktik keagamaannya tidak mempersoalkan empat mazhab tadi untuk dipraktikkan misalnya ada yang membaca Qunut, melaksanakan wiridan setelah sholat dan ada juga yang sebaliknya termasuk juga dalam melaksanakan wuduk dan lain-lain.

Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri sangat terkenal sebagai Lembaga Pendidikan da'wah, dimana misi da'wah menjadi program yang sangat diprioritaskan, pada masa kepemimpinan TGH. Shafwan Hakim (*Alm*), beliau menaruh perhatian yang begitu serius dalam dunia da'wah, bahkan sampai mengirim para santri dan alumninya sampai ke pelosok-pelosok pedesaan untuk misi dakwah.

Setelah TGH. Shafwan Hakim wafat, estafet pimpinan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim dilanjutkan oleh TGH. Muharrar Mahfudz, yang notabene merupakan keluarga dari TGH. Shafwan Hakim yang secara latar belakang terdapat perbedaan karakter yang menonjol diantara keduanya, yang mana TGH. Muharrar Mahfudz adalah seorang Tuan Guru yang sangat aktif di dunia politik di NTB, sebagai seorang politisi senior beliau sangat faham bagaimana perjuangan dakwah melalui politik, beliau aktif sebagai kader Partai PKS, bahkan pernah menjadi Ketua Wilayah Partai PKS Provinsi NTB, dan sekarang masih aktif sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai PKS Provinsi NTB. Melihat rekam jejak TGH. Muharrar Mahfuz dalam dunia politik ini. Akankah terjadi pergeseran peran-peran Tuan Guru sebagai pendidik Yayasan Pendidikan Nurul Hakim, karena hal ini sangat terkait dengan bagaimana aktivitas para Tuan Guru mendidik dan mengajar para santri di pondok, bagaimana mendidik dan mengajar jamaah dimajlis-majlis taklim yang dibina, bagaimana pula dengan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para Tuan Guru. Sehingga akankah terjadi perubahan arah kebijakan dilingkungan Yayasan disebabkan adanya Tuan Guru yang berpolitik, ataukah Yayasan tetap mempertahankan status Yayasan sebelumnya, yakni murni pada wilayah pendidikan dan dakwah.

Sementara itu selain tercatat sebagai kader dan pimpinan partai politik, TGH. Muharrar Mahfuz juga pernah sebagai anggota DPRD Prov NTB dan pernah sebagai bakal calon Bupati Lombok Barat serta pernah sebagai ketua tim pemenang paket Fauzan-Sumiatun (*calon Bupati Lombok Barat 2018*), keterlibatan Tuan Guru Muharrar Mahfuz dalam politik ini penting untuk didalami, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dan motivasi perjuangan politik beliau, ataukah mungkin seperti yang digambarkan oleh Ahmad Patoni berikut ini;

Menurut Ahmad Patoni, orientasi para kiai terjun ke dunia politik adalah untuk menegakkan *amr bi al-ma'rûf wa nahy „an al-munkar*. Konsep ini diletakkan dalam pengertian yang luas, yaitu pengawasan dan evaluasi. Dalam pandangan kiai, konsep ini memiliki peran signifikan, karena dalam kenyataannya tatanan sosial-politik yang ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah para kiai merasa perlu untuk terjun ke dalam dunia politik untuk mewujudkan kontrol kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum, maupun aturan agama (Anwar, 2018).

Keterlibatan kiai dalam politik, tidak bisa dilihat hanya sebagai sikap sesaat. Pilihan sikap tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika sosial politik yang sedang berkembang, dan juga berkaitan dengan seluk beluk politik pada masa sebelumnya. Pada era orde baru, kecenderungan arus politik yang sentralistik menjadikan kiai menghadapi dilema, khususnya saat berhadapan dengan pemerintah. Segala aktivitas politik masyarakat, termasuk aktivitas politik yang dilakukan kiai, dibatasi atau bahkan dicurigai. Untuk memudahkan kontrol terhadap aktivitas kalangan kiai, pemerintah membentuk majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah koordinasi gerakan ulama (Kurniawan, 2013)

Ini menarik untuk didalami, mengingat keterlibatan pimpinan Yayasan Pendidikan, Tuan Guru, kiyai, dan lain sebagainya selalu menimbulkan kan kontroversi, ada yang mendukung dan adapula yang tidak mendukung, tentu dengan alasan yang sama-sama kuat, hal ini persis seperti yang digambarkan oleh Syamsul Rizal dalam penelitiannya menyatakan:

Keterlibatan kiai dalam politik selama ini kerap menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, keterlibatan kiai dalam politik dimaknai sebagai sebuah dinamika politik pesantren yang mempunyai efek positif, karena akan mendorong terciptanya masyarakat yang partisipatif dan kritis, menggerakkan modal sosial publik untuk bersama membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik dan mandiri, serta memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk mengekspresikan pemikiran dan tindakannya tanpa adanya kungkungan monopoli kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan oleh setiap orang dimungkinkan memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda (Irawan, 2019).

Pandangan Syamsul Rizal ini menunjukkan bagaimana fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan, khususnya diwilayah Kabupaten Lombok Barat, yang dalam setiap momentum pemilu maupun pemilukada Tuan Guru dan pondok pesantren selalu mengisi dan menghiasai ruang kontestasi

Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bentuk pergeseran peran Tuan Guru sebagai pendidik di Yayasan Nurul Hakim Lombok Kediri dan dampak pergeseran peran Tuan Guru sebagai pendidik di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim.

Itulah sebabnya menarik untuk diteliti, sehingga dalam konteks ini peneliti akan mencoba menggali (*mendalami*) sejauhmana Pergeseran peran Tuan Guru sebagai pendidik di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri dan bagaimana dampak pergeseran tersebut terhadap perkembangan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri. Akankah Yayasan tersebut semakin maju ataukah sebaliknya terjadi kemunduran. Mengingat Tuan Guru pimpinan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim ini memiliki sejarah (catatan) keterlibatan yang begitu aktif dalam setiap momentum pemilu, baik pemilukada maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Metode

Adapun bentuk penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif karena pada umumnya permasalahan yang diteliti belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna (Sugiyono, 2017). Data-data yang peneliti ambil adalah dari sumber data primer yang diperoleh melalui survei, kuesioner, interview (*wawancara*), dan observasi dan data sekunder (*membaca buku-buku, literatur, dokumen, yang terkait dengan masalah yang diteliti*), yang kemudian peneliti analisis dan dalam serta disusun dalam bentuk narasi kalimat kualitatif-deskriptif

Adapun metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (*sebagai lawannya adalah eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (*gabungan*), Triangulasi teknik yakni peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak, Triangulasi Sumber peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, langkah ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui data yang diperoleh itu meluas, tidak konsisten atau masih terdapat kontradiksi, sehingga dari keadaan data tidak konsisten itu nantinya dapat menghasilkan data yang konsisten dan pasti. (Sugiyono, 2017).

Analisis data dalam penelitian ada tiga yaitu, Reduksi Data, Model data (*Data Display*), dan verifikasi kesimpulan. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) Untuk memperoleh data yang valid, akurat dan obyektif, kehadiran peneliti dilokasi penelitian adalah mutlak (*wajib*) dilakukan oleh peneliti. Sehingga untuk lebih mudah memperoleh data yang valid dan akurat dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan melakukan kegiatan observasi, wawancara dan pendokumentasian data dilapangan, membangun komunikasi, koordinasi dan hubungan yang baik, akrab dan dinamis dengan para narasumber yang menjadi sumber data .

Hasil dan Pembahasan

A. Dampak Terhadap Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri

Nurcholish Madjid menjelaskan Perantren beserta kiai dan santrinya tidak hanya bergerak diwilayah pendidikan sekalipun itu adalah fungsi yang pertama dan utama dalam pemikirannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa pesantren juga memiliki misi dakwah kepada masyarakat luas, dan kiai atau ulama yang notabene masuk dalam golongan cendekiawan mau tidak mau terlibat dalam perubahan sosial, dan pergerakan nasional. Mereka dengan segala kapasitas dirinya telah menempati posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat (Madjid, 1997).

Jadi tidak mengherankan jika dengan pernah terlibatnya TGH. Shafwan Hakim dalam dunia politik sebelum akhirnya menarik diri (mengundurkan diri) dari kegiatan politik parakti dan memilih untuk fokus berkhidmat di pondok, menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perjalanan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim.

Disisi yang lain TGH. Muharrar Mahfudz yang melanjutkan perjuangan TGH. Shafwan Hakim yang memilih mundur, karir TGH. Muharrar Mahafudz dalam politik terus menanjak naik sehingga pada tahun 1982 beliau sudah memimpin partai PPP ditingkat kabupaten, yakni tepatnya kepemimpinan beliau pada perodesasi 1982-1984 yang kemudian menghantarkan beliau menjadi anggota DPRD pada tahun 1982-1987, TGH. Muharrar sangat memahami bagaimana pergolakan perpolitikan yang terjadi pada saat itu baik ditingkat daerah maupun ditingkat nasional, karena beliau selaku tokoh partai yang tidak pernah absen mengikuti perkembangan politik pada saat itu bahkan sampai sekarang.

Aktif dalam Politik adalah merupakan pilihan rasional yang sudah dipikirkan secara matang, karena ia berkeyakinan politik menjadi medan dakwah yang juga harus dikelola, sehingga nanti dapat menjadi pembela dan pejuang hak-hak rakyat ditingkat kebijakan pemerintah.

Dalam perjalanan sejarahnya Yayasan Pendidikan Nurul Hakim memang sudah tidak asing lagi dengan politik, mengingat TGH. Abdul Karim (Alm) juga pernah menjadi bagian dari partai politik Parmusi yang kemudian menghantarkan beliau menjadi anggota konstituante bersama TGH. M. Zainuddin Abdul Majid Pancor pada tahun 1956-1959, dan pernah berafiliasinya Yayasan Pendidikan Nurul Hakim dengan Partai PPP sebelum ditarik lagi menjadi Yayasan yang independent, ternyata masih menyisakan semangat perjuangan. Semangat inilah yang kemudian menuntun dan secara tidak langsung mempengaruhi para Tuan Guru untuk terus melanjutkan kiprah dalam dunia politik.

Dengan keterlibatan aktif TGH. Muharrar Mahfudz dalam dunia politik dapat menambah dan memperluas jaringan dan persahabatan ditingkat lokal dan nasional sehingga mempermudah beliau untuk berbuat kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi para konstituen dan mempermudah beliau memperjuangkan program-program pemerintah untuk direalisasikan kepada rakyat.

Langkah politik ini sangat penting untuk diambil sebagai upaya untuk mempercepat perkembangan dan pembangunan Yayasan, dimana saat ini memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki nilai jual yang tinggi, meskipun secara kelembagaan tidak mengarahkan dukungan secara resmi terhadap setiap kontestan yang datang bersilatullah ke Yayasan Pendidikan Nurul Hakim.

Berdasarkan temuan data dan fakta-fakta, baik catatan sejarah maupun proses yang sedang terjadi di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim, bahwa eksistensi Tuan Guru sangat vital dan sangat berpengaruh baik dilingkungan pondok maupun diluar pondoknya. Dibidang pendidikan Tuan Guru menempati posisi yang paling istimewa, penilaian dan pengakuan masyarakat yang begitu tinggi terhadap mereka adalah akibat dari situasi kondisi masyarakat dan struktur sosial yang sudah mentradisi dan mendarah daging sehingga sulit untuk dihilangkan, kondisi sosial masyarakat yang saling berinteraksi, saling ketergantungan dengan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri menjadi tali perekat yang begitu kuat, Tuan Guru adalah makhluk sosial ia menciptakan situasi sosial untuk menunjukkan dan mempertahankan eksistensinya.

Dalam bidang pendidikan dan dakwah Eksistensi TGH. Shafwan Hakim (Alm), TGH. Muharrar Mahfudz dan TGH. Muzakkar Idris adalah kunci dari kesuksesan pendidikan, pengembangan dan pembangunan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri, sehingga sampai pada puncak kemajuannya saat ini.

Perjuangan yang dilakukan melalui berbagai jalur ikhtiar baik pendidikan, dakwah, ekonomi dan politik adalah semata-mata untuk satu tujuan yakni membesarkan dan mamajukan Yayasan mengingat secara fakta sejarah bahwa bagaimana keadaan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim diawal berdirinya masih sangat jauh dari kemajuan, dengan kecakapan yang dimilikinya, dibawah kepemimpinan dan binaan TGH. Safwan Hakim (Alm) yang juga tercatat pernah aktif di dunia politik bahkan sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Yayasan Pendidikan Nurul Hakim bergerak cepat dan berevolusi menjadi Yayasan Pendidikan besar dengan kemajuan pembangunan dan pendidikan disegala bidang

Dalam membangun, mengembangkan dan membesarkan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim. TGH. Shafwan Hakim, TGH. Muharrar Mahfudz dan TGH. Muzakkar Idris, dari semasa muda sudah bersama-sama, bahu-membahu, saling mengisi dan melengkapi dalam memajukan Pondok, Kemajuan-kemajuan yang didapatkan Pondok selama perjuangan mereka sangat banyak sekali (bisa dilihat pada Bab II, Paparan data dan temuan). Ini menunjukkan betapa gigihnya perjuangan mereka baik melalui pendidikan bahkan jalur politik dengan tujuan dan cita-cita besar yaitu untuk memajukan dan membesarkan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim seperti yang terlihat sekarang ini.

Adapun dampak-dampak dari keterlibatan Tuan Guru dalam politik terhadap pengembangan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim berdasarkan data yang ditemukan antara lain, semasa TGH. Shafwan Hakim dan TGH. Muharrar Mahfudz menjadi Anggota DPRD serta berdasarkan hasil kerjasama politik yang dilakukan bahwa beliau dapat memperjuangkan anggaran untuk lembaga-lembaga pendidikan, memperjuangkan beasiswa untuk para santri/santriwati, mereka berhasil membuat MOU dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memberikan beasiswa kedokteran kepada santri 5 orang setiap tahun.

Secara internal kelembagaan, kapasitas TGH. Shafwan Hakim sebagai tokoh dan pimpinan sentral Yayasan mampu mendorong dan menciptakan struktur organisasi Yayasan Pendidikan Nurul Hakim yang kuat, menggerakkan setiap bidang dan bagian struktur untuk aktif dan bekerja keras. Sehingga dari tahun ke tahun, langkah demi langkah perkembangan dan kemajuan Yayasan terus menanjak kelevel puncak kemajuan, hal ini bisa dilihat dalam perjalanan sejarah berdirinya Yayasan sampai dengan saat ini, begitu banyak capaian-capaian prestasi yang didapatkan

Sebagai pimpinan sentral TGH. Shafwan Hakim memiliki otoritas untuk mengambil setiap keputusan tanpa harus melalui musyawarah mufakat, melakukan perombakan terhadap struktur organisasi Yayasan dan juga dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang lainnya. Dalam faktanya dengan kharisma yang dimilikinya dalam setiap keputusan dan kebijakannya selalu di amini (ikuti) oleh setiap pengurus dan pengelola lembaga-lembaga dibawah Yayasan

TGH. Muharrar Mahfudz menggantikan TGH. Shafwan Hakim sebagai pimpinan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok yakni satu tahun sebelum TGH. Shafwan Hakim wafat, yang pada saat itu dilaksanakan sebuah rapat kecil (internal) beberapa orang dan beliau sendiri yang memberikan amanah menunjuk TGH. Muharrar Mahfudz sebagai Ketua Yayasan dan beliau naik sebagai Pembina Yayasan, yang pada saat itu juga beliau sendiri yang menunjuk Ustadz Nawawi

Hakim sebagai Wakil Ketua satu dan TGH. Muzakkar Idris sebagai Wakil Ketua dua yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

Dalam kepemimpinan TGH. Muharrar Mahfudz terdapat perbedaan yang begitu mencolok, dimana pada saat kepemimpinan TGH. Shafwan Hakim sangat sentralistik dan memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengontrol lembaga, namun pada saat ini justru terbalik. Dimana TGH. Muharrar Mahfudz dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama-sama dengan pengurus Yayasan yang lain, sehingga setiap keputusan dan kebijakan itu adalah hasil bersama dalam rapat-rapat Yayasan.

Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga menjaga keberlangsungan komitmen kerjasama yang kuat dan utuh antar pengurus Yayasan dan untuk menciptakan suasana pengelolaan struktur organisasi Yayasan dengan penuh kekeluargaan. Sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama, bahwa kemajuan-kemajuan yang didapatkan saat ini adalah hasil bersama. Distribusi kekuasaan ini penting untuk dilakukan dalam struktur organisasi mengingat Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok adalah Yayasan yang besar yang mengelola berbagai lembaga pendidikan dari tingkat TK/RA sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi serta dan lembaga formal sampai dengan lembaga-lembaga nonformal. Sehingga untuk memajukannya butuh kerjasama yang kuat antara pengurus yang satu dengan yang lainnya. Pada posisi ini kemudian TGH. Muharrar Mahfudz adalah sebagai penanggung jawab umum selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri (Oktara, 2015).

Prinsip pengelolaan struktur organisasi yang baik dan profesional akan menghasilkan hasil yang maksimal juga, disebabkan semua potensi dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Tata kelola yang penuh keterbukaan menjadi poin penting yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki, belum lagi dengan berbagai upaya Yayasan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)nya, baik untuk para dewan guru maupun kualitas para santrinya.

Dalam konteks politik TGH. Muharrar Mahfudz sekalipun sebagai seorang politisi, ia selaku pimpinan Yayasan tidak pernah menggerakkan struktur organisasi Yayasan untuk ikut mendukung calon yang bertarung baik dalam pemilu maupun dalam pilpres, mereka diberikan kebebasan berdasarkan hak-hak konstitusional masing-masing untuk mendukung siapa saja yang mereka kehendaki. Ia sekalipun aktif dalam politik akan tetapi tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik di pondok, yang setiap hari dan setiap waktu bersama para santri, bahkan untuk saat ini ia hampir seratus persen berada dipondok untuk berkhidmat menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpinan Yayasan maupun sebagai pendidik dan pembimbing.

Akan tetapi tetap saja dengan status yang TGH. Muharrar Mahfudz sebagai seorang politisi yang saat ini terhitung masih aktif menjadikan dalam setiap pemikiran dan penilaian orang tidak berubah, bahwa beliau adalah politisi sekalipun waktunya dihabiskan untuk mengurus pondok, santri dan jamaahnya, karena perubahan status yang awalnya sebagai pendidik kemudian bergeser menjadi politisi itu melekat kuat dan sulit untuk dihilangkan, karena dalam aras ini, ada wujud perubahan yang sangat jelas dimana Tuan Guru yang awalnya adalah sebagai seorang pendidik, pengajar dan pembimbing santri dan jamaahnya mengambil peran tambahan menjadi seorang politisi. Peralihan posisi dari pendidik menjadi politisi inilah yang disebut dengan pergeseran disebabkan Tuan Guru tidak lagi konsisten pada peran awalnya sebagai seorang pendidik.

Dengan pergeseran peran Tuan Guru ini, maka secara otomatis bisa makna bahwa telah terjadi perubahan sosial ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dikuatkan karena gelar Tuan Guru adalah gelar yang disematkan (diberikan) kepada seorang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan luas, disertai dengan tingkat akhlak (adab) yang tinggi dan mulia yang menjadi penutan masyarakat

Fakta ini dikuatkan oleh pendapat Nazar, bahwa Perubahan sosial dapat terjadi baik direncanakan maupun tidak direncanakan, dan bisa terjadi secara cepat maupun lambat, sangat tergantung faktor-faktor dan lingkungan yang mempengaruhinya. Perubahan sosial dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan manusia, ruang gerak perubahan itupun juga berlapis-lapis, dimulai dari kelompok terkecil, atau dimulai dari tingkat individu, keluarga hingga tingkat dunia (Naamy, 2016).

Pergeseran peran Tuan Guru ini praktis secara tidak langsung akan mempengaruhi struktur dan situasi sosial itu sendiri, nilai-nilai fanatisme, hubungan emosional, hubungan sejarah (historis) dan hubungan darah kekeluargaan serta kekerabatan akan secara alamiah menggiring mereka untuk mengamini dan mengikuti (untuk tidak mengatakan mengajak) langkah-langkah yang diambil Tuan Guru baik dalam urusan pendidikan maupun urusan politik

B. Dampak Terhadap Manajemen Pelayanan di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim

Seperti yang disampaikan oleh Aristoteles dalam teorinya, bahwa manusia adalah makhluk politik. Menunjukkan betapa kehidupan manusia tidak akan pernah jauh dari politik atau bisa dimaknai tidak akan bisa hidup tanpa politik. Mengingat bahwa sesungguhnya politik itu ada suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks keterlibatan Tuan Guru dalam panggung politik praktis itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi, karena Tuan Guru menggunakan hak dasar, hak azasinya untuk melangkah sesuai dengan yang diinginkan. akan tetapi pada aras ini ketika seseorang sudah diberikan atau menyandang gelar tuan guru, maka ada tanggung jawab moral yang begitu tinggi yang harus ia pertanggung jawabkan ditengah-tengah masyarakat, mengingat Tuan Guru adalah gelar yang diberikan berdasarkan pengakuan masyarakat atas ilmu keagamaan yang mendalam dan luas yang dimiliki, gelar Tuan Guru tidak semata-mata gelar tanpa memiliki makna dan nilai tinggi, akan tetapi sebaliknya bisa dikatakan Tuan

Guru itu adalah gelar spriritual-sosial yang begitu tinggi dari masyarakat. Sehingga sangat logis kekhawatiran yang diungkapkan oleh Nazar ini;

“Karena yang menjadi persoalan besar dan sensitif sekarang ini adalah dimana ketika sosok Tuan Guru yang selama ini sangat didengar, diikuti, disegani dan bahkan tidak boleh dibantah oleh para santri dan masyarakatnya (jamaah) karena mempunyai otoritas sentral yang kuat dan kharismatik, jika mereka terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, maka konsekwensinya mereka akan mendapatkan berbagai kritikan, protes aksi masa, atau bahkan akan mendapatkan cacian, makian dan hinaan yang berpotensi dapat menimbulkan konflik horizontal (Naamy, 2016).”

Dampak dalam setiap langkah dan keputusan terjun ke panggung politik praktis pasti menjadi sorotan masyarakat dan penilaian tersendiri bagi masyarakat, apapun alasan yang menjadi pembeda dari keputusan itu, kontroversi pasti muncul, ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung, semua dengan alasan masing-masing. Namun terlepas dari itu semua, bahwa dengan terlibatnya Tuan Guru dalam politik pasti akan membawa dampak kepada Yayasan Pendidikan Nurul Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung, apakah dampak tersebut mewujudkan dalam bentuk fisik ataukah sebatas mempermudah akses kepada kekuasaan untuk kepentingan yang lain (Turmudi, 2004).

Dalam bentuk akses dan jaringan, tentu posisi Tuan Guru yang pernah duduk dalam jabatan sebagai Anggota DPRD dapat membuka jalan yang seluas-luasnya untuk ikut terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran suatu program pemerintah dan bahkan mengusulkan program kepada pemerintah untuk dilaksanakan, baik itu berupa program fisik, program pemberdayaan masyarakat ataukah program pembinaan masyarakat.

Karena dalam teori perilaku sosial dijelaskan bahwa ada hubungan antara akibat dari tingkah laku dalam lingkungan seseorang dengan tingkah lakunya seperti yang dijelaskan oleh Nazar.. “Teori perilaku sosial dibangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku dalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatian kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Akibat-akibat tingkah laku diperlakukan sebagai variabel independen, artinya teori ini berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian (Naamy, 2016).”

Dari teori ini sudah sangat jelas menerangkan fakta-fakta sosial, bahwa kehidupan dalam lingkungan pergaulan politik yang dilakukan oleh Tuan Guru akan mempengaruhi perilaku atau kehidupannya sehari-hari bahkan ada akibat-akibat yang akan menyertainya kemudian. Artinya dari keterlibatan Tuan Guru itu membawa dampak signifikan bagi Yayasan Pendidikan Nurul Hakim baik dari sisi pengembangan lembaga maupun dari sisi pembangunan secara fisik.

Dalam hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan memang benar ada beberapa bentuk pembangunan fisik dilingkungan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim yang didapatkan atau didanai dari dana aspirasi Anggota DPRD maupun aspirasi dari dana Anggota DPRRI, inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam berpolitik.

Adapun beberapa bentuk pembangunan fisik dari dana aspirasi Anggota DPRD dan DPRRI dilingkungan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim seperti, Pembangunan jembatan pondok, Pembangunan jalan, Pembangunan rabat jalan, Pembangunan tower-tower air, Pembangunan sanitasi, Pembangunan selokan-selokan, dan lain-lain (Idi, 2011).

Belum lagi pembangunan-pembangunan gedung sekolah dari tingkat TK/RA sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Fakta-fakta pesatnya pembangunan-pembangunan fisik yang ada di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim ini, menunjukkan adanya keseriusan Yayasan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan maksimal kepada semua santri yang menimba ilmu di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri dan sebagai nilai positif dan manfaat yang didapatkan juga dari keterlibatan Tuan Guru dalam politik dalam mempercepat proses pembangunan fasilitas-fasilitas (sarana) penunjang dalam proses pendidikan dilingkungan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri.

Manajemen pelayanan yang begitu profesional dan terpusat di Yayasan sebagai upaya kontrol terhadap proses pemasukan dan pengeluaran dana Yayasan. Ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki serta mempermudah akses kontrol dan kendali dalam setiap perencanaan dan pembangunan serta pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan juga menunjukkan adanya tingkat keseriusan yang tinggi dimana bisa dilihat bagaimana geliat aktivitas pendidikan dan pengajaran yang begitu padat. Para ustazd/ustazah (guru) dan pimpinan Yayasan yang begitu sibuk mengisi jadwal-jadwal mengajar dan pengajian baik di Madrasah, di pondok ataukah diluar pondok. Ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal bagi para santri. Para santri diwajibkan untuk mondok (masuk asrama) dan tidak diperbolehkan pulang pergi kecuali bagi mahasiswa dilembaga Perguruan Tingginya.

Itulah sebabnya TGH. Muharrar Mahfudz memberikan keluasan yang begitu besar kepada setiap pengurus Yayasan dan pimpinan lembaga untuk berkreasi membuat program-program pendidikan dalam rangka mamajukan setiap lembaga pendidikan masing-masing dengan tetap berkoordinasi kepada pimpinan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara bersama-sama. Karena tidak mungkin seorang pimpinan akan berkerja sendiri untuk membangun dan memajukan Yayasan, ia butuh orang lain yang diajak bekerjasama, bahu-membahu demi terwujud tujuan pendidikan (Wirawan, 2013).

Kondisi ini persis seperti yang dijelaskan Marx, bahwa manusia harus bekerja bersama-sama untuk menghasilkan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk hidup. Tuan Guru adalah makhluk sosial yang juga membutuhkan manusia

lainnya untuk memberikan pengakuan dan status sosial apalagi dalam upaya membangun peradaban dan mempertahankan eksistensinya, ia tidak bisa sendirian ia harus mencari dukungan dan bantuan manusia lainnya.

Oleh karena itu menjadi jelas bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pergeseran peran tuan guru sebagai pendidik, dimana dengan pengalaman keorganisasian dan pengalaman kerja tuan guru didunia politik dan birokrasi mampu memberikan dampak yang signifikan dalam bidang manajemen pelayanan lembaga, memberikan pembinaan-pembinaan (*kaderisasi*) agar mampu bekerja secara profesional, meningkatkan kualitas SDM pengurus dan pimpinan lembaga dibawah Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri.

Kesimpulan

1. Bentuk Pergeseran Peran Tuan Guru Sebagai Pendidik di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri

Tuan Guru hakikatnya adalah sebagai pendidik dan mereka memiliki otoritas, kewenangan, legitimasi dan kharisma tinggi, sehingga status itu tidak sembarang diberikan oleh masyarakat. Namun dalam faktanya Tuan Guru tidak selalu konsisten menjaga pengakuan status sosial-spiritual yang diberikan agar tetap menjadi tokoh yang sunyi dari riak-riak politik, dengan berbagai alasan dan motivasi, merekapun beralih peran menjadi seorang politisi. Sehingga dalam konteks ini Tuan Guru tidak lagi dikenal murni hanya sebagai seorang pendidik, pembimbing akan tetapi memiliki status baru yakni sebagai seorang politisi. Alasan dan motivasi Tuan Guru terjun ke dunia politik adalah karena mereka berkeyakinan bahwa politik tidak harus dipandang hanya sebatas tentang urusan dunia saja, akan tetapi politik juga bisa dijadikan sebagai medan dakwah yang harus digarap untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang clean and government

Artinya bahwa pertukaran (pergeseran) peran oleh Tuan Guru dari semula sebagai pendidik menjadi seorang politisi memiliki maksud dan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya, bahkan sudah diperhitungkan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Sehingga dengan tujuan itu Tuan Guru terus termotivasi dalam menjalankan perannya baik sebagai pendidik maupun sebagai politisi.

2. Dampak Pergeseran Peran Tuan Guru Sebagai Pendidik Di Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri

Tuan Guru dengan isntitusinya harus mampu menciptakan situasi sosial dan mempertahankan struktur sosial yang sudah ada serta membangun relasi (jaringan) yang besar dan kuat untuk menopang keberlangsungan institusinya. Sehingga menjadi keharusan untuk berinteraksi (membangun jaringan) dengan masyarakat dan dengan dunia luar guna mewujudkan tujuan-tujuannya. Itulah sebabnya Tuan Guru ada yang mengambil peran menjadi politisi dan juga bertahan sebagai pendidik, dalam hal ini keterlibatan TGH. Shafwan Hakim (Alm) sebelum fokus kembali kepondok, dan keterlibatan TGH. Muharrar Mahfudz dalam politik praktis saat ini harus dimaknai positif sebagai sebuah langkah untuk mengembangkan, memajukan dan mempertahankan istitusinya.

Sehingga berdasarkan data dan fakta-fakta dilapangan menunjukkan begitu banyak progres pengembangan dan pembangunan akibat dampak dari manfaat (keuntungan) politik Tuan Guru baik berupa upaya membangun struktur organiasai yang kuat, meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperjuangkan program untuk pengembangan dan pendidikan para santri dengan memperjuangkan beasiswa dan anggaran pendidikan lainnya. Memperjuangkan anggaran untuk pembangunan lembaga pendidikan maupun keuntungan-keuntungan secara pembangunan fisik dari dana aspirasi Anggota DPRD dan DPR RI dilingkungan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Kediri.

Rekomendasi

1. Pimpinan Yayasan Pendidikan Nurul Hakim Lombok Kediri khususnya yang aktif sebagai politisi, agar tetap menjaga nama baik lembaga dan juga menjaga diri agar tidak terjerumus kedalam lingkaran setan yang dapat menghancurkan nama baik lembaga.
2. Berjuang berjuang dengan menegakkan nilai-nilai ajaran Islam (Amr Ma'ruf Nahi Mungkar), dan memperluas medan dakwah
3. Pimpinan Yayasan yang masih konsisten dalam dunia pendidikan agar tetap mempertahankan posisinya sebagai pencetak generasi emas dimasa yang akan datang, mencetak generasi-generasi terdidik, cakap dan terampil sehingga mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman

Referensi

- Adi Fadli, M. Ahyar Fadli, Dkk. *Setengah Abad Nurul Hakim, Menyingkap Sejarah Dan Kontribusi Nurul Hakim Bagi Masyarakat*. Narmada: Pustaka Lombok, 2019.
- Anwar, Muh. Samsul. "Dinamika Peran Politik Tuan Guru Di LomBok Era Reformasi." *Thaqafiyat* 18, no. 2 (2018). Artikel, Pedoman Penulisan. "Makalah, Proposal, Tesis, Dan Disertasi Pascasarjana." Universitas Mataram, (2018).
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, (2016).
- Goodman, George Ritzer – Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. jakarta: Kencana Prenadamedia, (2004).
- Idi, Abdullah. *Sosiologi Pendidikan; Individu, Masyarakat Dan Pendidikan*. jakarta: RajaGrafindo Persada, (2011).
- Irawan, Bambang. *E-Goverment, Konsep, Esensi Dan Study Kasus*,(2019).
- Jamaludin. *Sejarah Islam Lombok (Abad XVI-abad XX)*. Yogyakarta: Ruas Media, (2019).

- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, (2017).
- Kurniawan, Syamsul. *Pendidikan Karakter, Konsepsi Dan Implementasinya Secara Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi Dan Masyarakat*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, (2013).
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, (1997).
- Muslim Mufti. *"Teori-Teori Politik"*. Bandung: Pustaka Setia, (2013).
- Musthofa. *"Kedatangan Islam dan Pertumbuhan Pondok Pesantren di Indonesia Perspektif Filsafat Sejarah"*. An-Nuha Vol. 2, No. 1, Juli 2015; 2. diakses 9 Mei (2019). <http://scholar.google.co.id>.
- Naamy, Nazar. *Politik Tuan Guru, Antara Idealitas Moral Dan Pragmatisme Politik*. Mataram: Sanabil, (2016).
- Oktara, Arie. "Politik Tuan Guru Di Nusa Tenggara Barat." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2015).
- Poerwadarminta. *"Kamus Bahasa Indonesia"*, Jakarta, Balai Pustaka, (2007).
- Ramayulis. *"Metodologi Pendidikan Agama Islam"*, Jakarta; Kalam Mulia, (2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2017).
- Sukring. *"Pendidikan Dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik (Analisis Perspektif Pendidikan Islam)"*. Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol. 01./1/2016; 72, diakses 27 Februari 2019. <http://scholar.google.co.id>.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Anksara, (2004).
- Umam, Faizul. "Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru Dalam Konteks Kebebasan Beragama Di Pulau Lombok." *Ulumuna* XIII, no. 2 (2018).
- Wasisto Raharjo Jati. *"Ulama dan Pesantren Dalam Dinamika Politik dan Kultur Nahdlatul Ulama"*. Ulul Albab Volume 13, No.1 Tahun 2012; 105. diakses 9 Mei 2019. <http://scholar.google.co.id>.
- Wirawan, IB. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, (2013).